

**STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH DINAS KOPERASI DAN  
UMKM  
KOTA PADANG**

**M. Rezki Sonima**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
[mrezkisonima1999@gmail.com](mailto:mrezkisonima1999@gmail.com)

**Abstract**

*This article aims to explain research findings in the form of MSME development strategies during the Covid-19 Pandemic by the Padang City Cooperatives and MSMEs Office; researchers describe the problems that occur in the MSME sector during the Covid-19 Pandemic in Padang City. Furthermore, the purpose of the study is to explain the strategies, constraints, efforts, and steps taken by the Department of Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) of Padang City. The research method that the researcher uses is descriptive qualitative research that uses purposive sampling informant selection research techniques. Data collection was carried out using observation, interviews, and documentation studies. It can be seen that the results of this study indicate that the problems that occur in the MSME sector are pretty complex due to the multidimensional side effects of the pandemic on the businesses of MSME actors. Therefore a touch of a capable strategy is needed so that the MSME ecosystem can continue to develop sustainably in the city of Padang.*

**Keywords: Strategy, Development, MSMEs.**

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan temuan penelitian berupa strategi pengembangan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi di sektor UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang. Selanjutnya tujuan penelitian ialah untuk menjelaskan strategi, kendala serta upaya dan Langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik penelitian pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Dapat diketahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya permasalahan yang terjadi pada sektor UMKM cukup kompleks dikarenakan efek samping Pandemi yang multidimensional terhadap usaha dari para pelaku UMKM, maka dari itu diperlukan sentuhan strategi yang mumpuni agar ekosistem UMKM dapat terus berkembang secara berkelanjutan di Kota Padang.

**Kata kunci: Strategi, Pengembangan, UMKM.**

## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan transaksi ekonomi, proses tersebut sangat ditentukan oleh adanya permintaan barang serta jasa, sehingga kegiatan ekonomi di daerah sangat berkorelasi dengan adanya permintaan dan penawaran kegiatan ekonomi pada suatu lokasi kegiatan yang dikenal dengan istilah pasar. Pasar sendiri merupakan tempat atau lokasi terjadi pertemuan antara para penjual dan pembeli yang mana didalamnya terjadi proses tawar-menawar. Pasar menurut pendapat ahli disimpulkan sebagai sebuah tempat yang merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan secara langsung oleh permintaan dan penawaran.

Pertumbuhan penduduk yang makin pesat di Indonesia merupakan sebuah masalah tersendiri yang dihadapi oleh Indonesia terkhususnya di Kota Padang. Menurut hasil dari data yang dihimpun oleh lembaga Badan Pusat Statistik (BPS), total dari jumlah penduduk Kota Padang mencapai angka 914.970 di tahun 2016 lalu, dan akan terus bertambah seiring bertambahnya tahun. Tingginya angka dari jumlah penduduk tersebut menyebabkan banyak permasalahan terjadi seperti tingginya angka kriminalitas, pengangguran yang membludak dimana-mana, ketimpangan antara jumlah lapangan kerja dan jumlah angkatan kerja, serta problematika ekonomi dan sosial yang menyebabkan polarisasi ekonomi makin berjarak.

Pandemi Covid-19 belakangan memiliki dampak yang multidimensional dalam mempengaruhi usaha sektor bisnis, kondisi ini juga secara simultan mempengaruhi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Para pelaku UMKM bagaimanapun diharuskan menerima pil pahit dari kenyataan akibat dampak anjloknya pasar akibat dari kurangnya minat pembeli yang terdampak akibat adanya Pandemi. Berdasarkan hasil data yang di himpun oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, sampai pada bulan April tahun 2021 sudah terdeteksi bahwa ada kurang lebih 37.000 pelaku UMKM yang dilaporkan mengalami kemunduran signifikan yang mereka alami. Pemerintah dalam kondisi seperti ini diharuskan segera bertindak merespons keluhan pelaku UMKM dengan strategi untuk memulihkan serta bisa mengembangkan usahanya, apakah dengan cara menekankan pada sisi insentif sosial bagi pedagang yang penghidupan sehari-harinya terdampak akibat pandemic atau senacam bentuk bantuan lainnya sehingga mereka bisa kembali meneruskan usahanya.

Dari data internal diambil oleh Kementerian Koperasi dan UMKM menggambarkan ternyata ada sekitar 1.785 koperasi serta 163.713 dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang terdampak akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19. Mayoritas koperasi yang terdampak akibat Covid-19 berada di sektor kebutuhan harian, di sisi lain pada sektor UMKM menyebutkan secara jelas bahwa koperasi yang bergiat di bidang jasa dan sektor produksi ikut merasakan dampak penurunan yang signifikan akibat pandemi Covid-19. Banyak diantara para pengelola dari koperasi mengaku menemukan penurunan jumlah secara kalkulatif dalam hal penjualan, terjadinya kekurangan modal pada pengusaha, dan melambatnya proses distribusi. Di lain hal, sektor UMKM juga mengalami penurunan sejauh pandemi Covid-19 hingga pertengahan tahun 2021 selain berada di sektor makanan dan minuman, juga berada dalam sektor industri kreatif serta pertanian.

Dilansir dari informasi terbaru, data dari laman berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memperlihatkan bahwa ada puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang

menggelar aksi mengibarkan bendera putih tanda menyerah pada akhir Juli 2021 lalu. Diketahui bahwa pelaku usaha sudah tidak tahan lagi dengan aturan yang berlaku saat pandemi yang membuat pendapatan pelaku usaha menjadi jauh merosot dan tidak sedikit angka pelaku usaha yang telah gulung tikar. Padahal kita tahu bahwa UMKM memainkan peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Sehingga ditakutkan akan terjadi problematika ekonomi dan sosial seperti tingginya angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi.

Walaupun kita ketahui UMKM memainkan peranan penting dalam sektor ekonomi, namun ada beberapa bentuk keterbatasan dan kendala yang seringkali dihadapi oleh UMKM. Pertama, aksesibilitas yang sangat rendah pada sumber informasi bagi para pelaku sektor UMKM. Kedua, adanya angka peningkatan akses sementara peluang pasar tergolong rendah. Ketiga, rendahnya tidak cukup kuatnya kemampuan dalam mendatangkan sumber permodalan yang mumpuni. Keempat, rendahnya kemampuan dalam menguasai dan memberdayakan IT. Kelima, masih rendahnya kemampuan dalam hal pengembangan organisasi dan manajemen. Dan keenam, ketidakmampuan dalam membangun jaringan usaha dan mitra strategis di antara para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Hejaziey, 2009).

Beberapa dari rekomendasi yang bisa dijadikan solusi atas problematika ekonomi dan sosial yang terjadi seperti yang penulis jelaskan di atas ialah dengan memperbesar skalabilitas dan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dari data BPS pada tahun 2018 saja memperlihatkan bahwa UMKM dapat menyerap lebih dari 117 juta pekerja atau 97 % dari keseluruhan daya serap tenaga kerja dunia usaha pada tahun 2018. Tidak hanya itu, sektor UMKM juga memberikan dampak kontributif sebagai 61,07 % dari total PDB Indonesia. Berdasar pada urgensi pentingnya posisi UMKM di Kota Padang bagi pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tengah melakukan berbagai upaya untuk menyongsong kebangkitan UMKM. Seperti melakukan kerjasama dengan Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (IUMKM Akumandiri) di Kota Padang dan masih banyak langkah pengembangan maupun pembinaan lainnya sehingga para pelaku UMKM bisa kembali bergairah dalam menggerakkan usahanya.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya menjelaskan serinci mungkin baik dari gejala maupun keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan di lapangan (Muhktar, 2013). Sedangkan Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Moleong & Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2013) Penelitian kualitatif adalah sebuah data yang bisa dihasilkan dari ucapan seseorang baik lisan maupun tulisan dari perilaku orang yang diamati oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif akan memperlihatkan bagaimana kegiatan digambarkan secara sistematis dalam menjabarkan fakta dan karakteristik subjek atau objek secara teliti, tepat dan mendetail. Penelitian berlokasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan beberapa sektor UMKM di Kota Padang, kemudian pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukannya dengan cara observasi, wawancara serta

studi dokumentasi.

Dalam menganalisa data dari hasil penelitian, peneliti menggunakan langkah kerja dari Burhan Bungin (2020) yaitu dengan melewati tahap catatan harian, transkrip, koding, kategorisasi, tema, memos. Sedangkan uji keabsahan data yang peneliti lakukan pada penelitian kali ini adalah menggunakan cara uji kredibilitas data, keteralihan data temuan dan objektivitas data. Untuk kemudian mengetahui dan dapat menjamin keabsahan data, peneliti melakukan teknik pemeriksaan untuk keabsahan data yang mana memeriksa secara seksama sejumlah data yang didapat selama di lapangan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang dalam Melakukan Pengembangan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19**

Dari data BPS pada tahun 2018 memperlihatkan bahwa UMKM dapat mengakomodir kebutuhan 117 juta pekerja atau 97% dari serapan tenaga kerja sektor dunia usaha pada tahun 2018. Tidak hanya itu, sektor UMKM juga memberikan bantuan yang sifatnya kontributif sebagai 61,07 persen dari total PDB Indonesia. Berdasar pada urgensi pentingnya posisi UMKM di Kota Padang bagi pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tengah melakukan berbagai upaya untuk menyongsong kebangkitan UMKM. Seperti melakukan kerjasama dengan Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AIUMKM Akumandiri) di Kota Padang serta masih banyak langkah pengembangan maupun pembinaan lainnya yang bisa digunakan sebagai bentuk dukungan atau support kepada dunia usaha Kota Padang.

Menurut pendapat dari Suryono (2004), menyebutkan bahwa strategi pada ketentuannya akanberhubungan dengan permasalahan meliputi; kebijakan pelaksanaan, penentuan visi dan tujuan yang akandiraih, sertadalam menentukan sistematika cara-cara maupun dalam penggunaan metode sarana-prasarana. Strategi juga berkorelasi dengan adanya sarana, tujuan dan cara. Oleh karenanya, strategi mesti diberi dukungan dari kemampuan para pengambil kebijakandalam menyiapkan Langkah antisipatif dan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam menjalankan apa yang menjadi fungsi serta peranannya untuk mengembangkan lebih jauhsektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara terukur kedepan.

Selanjutnya mengenai strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang dalam melaksanakan bentuk-bentuk langkah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 akan lebih jauh dikaji secara komprehensif menggunakan pendekatan teoritis dari Agus Suryono (2004) yang menyebut bahwa strategi akan selalu menyangkut dengan persoalan; kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan, dan penentuan cara atau metode.

Indikator tersebut akan dibahas sesuai dengan temuan penelitian berikut:

#### **1.1. Kebijakan Pelaksanaan**

Pelaksanaan dari strategi pengembangan sesuai dengan kebijakan atau program Walikota Padang Nomor 8 yakni meliputi indikator mendorong prinsip-prinsip kerakyatan, pertumbuhan dan pengembangan bidang perekonomian, bisa menghasilkan lebih dari 1.000 wirausahawan baru di wilayah Kota Padang, menumbuhkembangkan sektor produktif ekonomi kreatif yang lebih inovatif, UMKM, dan pemberdayaan ekonomi langsung pada



masyarakat, selain itu kebijakan pelaksanaan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1998 yang didalamnya disebutkan bahwa proses pembinaan serta pengembangan UMKM dilaksanakan secara fokus mengarahkan UMKM pada wujud kemandirian usaha yang terpadu. Dampaknya secara berkelanjutan diharapkan bisa memberikan angin segar kembali kepada para pelaku UMKM sehingga dapat terus mengembangkan ide-idenya dalam berwirausaha.

Pada ayat 21 Peraturan Walikota Pada Nomor 35 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 dijabarkan bahwa dalam mengembangkan usahadimana notabenenyabentuk usahainimesti dilaksanakan oleh stakeholder pengambil kebijakan selaku pelaksana langsung dari buah kebijakan, para pengusaha UMKM, serta masyarakat umum sehingga bisa menumbuhkembangkan dunia usaha, untuk itu langkahnya ialah dengan menekankan pada pemberian infrastruktur dan struktur usaha, insentif berupa alat maupun proses pembinaan yang dapat memberi motivasi langsung terhadap dunia usaha secara kompetitif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan dari pelaksanaan strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang dalam melakukan pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan pergerakan yang cukup terstruktur dan sistematis menggunakan pendekatan yang bersifat berkelanjutan serta terarah langsung kepada para pelaku UMKM. Ini terbukti dengan langkah pendataan yang sedari awal sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sebelum mengidentifikasi UMKM yang berhak serta bisa mendapatkan pembinaan melalui proses yang selektif.

Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang juga bisa lebih menekankan pada pendekatan berkelanjutan karena terlihat dari pelatihan-pelatihan yang menurut keterangan lebih menekankan inovasi dan kreatifitas dari pelaku UMKM agar sektor usahanya dapat lebih berkembang walaupun berada di tengah-tengah tantangan pandemic Covid-19.

Selain dari pergerakan strategi yang cukup terstruktur serta pendekatan yang sifatnya berkelanjutan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memberdayakan tenaga-tenaga pendamping UMKM di tiap-tiap wilayah agar nantinya dapat dievaluasi kembali untuk mendapatkan laporan terkait UMKM yang bermasalah di wilayah tersebut dan butuh penanganan extra dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Namun, diakui yang menjadi suatu persoalan yang cukup kompleks pada pelaksanaan kebijakan strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang agar melaksanakan pengembangan UMKM ialah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, baik itu oleh pada tingkat di pemerintah pusat maupun di daerah belum disokong dengan pendanaan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan banyaknya pelaku UMKM yang usahanya menurut akibat dari adanya Pandemi Covid-19.

## 1.2. Penentuan Tujuan

Penentuan tujuan merupakan kesepakatan atas satu cita-cita yang sama dan diiringi oleh pelaksanaan yang sejalan dengan visi serta tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Penentuan tujuan dalam pengertian Suryono (2004) harus didukung dengan kemampuan implementor dalam mengantisipasi setiap kesempatan yang ada agar terus tercipta pengembangan dan inovasi baru.

Dari hasil penelitian diatas, ditemukan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

saat melaksanakan strategi pengembangan UMKM memiliki tujuan untuk tetap bisa memberikan pengembangan yang signifikan, terarah, berkelanjutan untuk UMKM secara merata di Kota Padang, terlebih dengan berbagai tantangan serta banyaknya hambatan di masa Covid-19.

Maka dari itu sebagai bentuk arahan dan turunan dari tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sebagai bentuk inisiatif dalam rangka menginisiasi tahapan pada pengembangan terhadap UMKM di Kota Padang dilakukan dengan menekankan penambahan skalabilitas daya jual serta peningkatan kualitas barang dan jasa dari UMKM sebagai bentuk upaya bertahan dan berkembang di masa-masa sulit Covid-19.

Selain mengupayakan penambahan skalabilitas daya jual serta peningkatan kualitas barang dan jasa dari UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang juga menggerakkan sosialisasi edukatif langsung ke lapangan kepada para pelaku UMKM yang tersebar di wilayah Kota Padang agar mereka bisa lebih mengembangkan usahanya melalui inovasi dan dapat melalui masa-masa kritis Covid-19.

### 1.3. Penentuan Cara atau Metode

Setelah memiliki perhitungan yang tepat atas konsep strategi kebijakan pelaksanaan serta penentuan tujuan dari strategi, tahapan yang disebut Agus Suryono (2004) sebagai tahapan teknis paling penting ialah penentuan cara atau metode yang digunakan untuk menerapkan strategi. Tanpa penentuan yang jelas terhadap cara atau metode yang akan digunakan, maka jalannya strategi akan mengalami berbagai hambatan sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penentuan cara atau metode merupakan kerangka kerja teknis dari pelaksanaan strategi ketika akan diterapkan di lapangan. Hasil dari strategi dapat diketahui dari efektif atau tidaknya cara maupun metode yang digunakan untuk menghadapi suatu persoalan. Metode yang tepat akan menghasilkan keberhasilan dari penerapan kebijakan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa cara yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam melaksanakan strategi pengembangan ialah diawali dengan melakukan pendataan awal lengkap pada UMKM yang tersebar di Kota Padang, data tersebut berisi tentang informasi lengkap mengenai kondisi dari berbagai UMKM tersebut. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk bahan lanjutan bagi proses pelaksanaan pada tahapan pembinaan dan pelatihan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Selain memberlakukan bentuk-bentuk pelatihan dan pembinaan terfokus, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang juga melakukan evaluasi kepada para tenaga pendamping UMKM agar nantinya dapat diketahui pengelompokkan antara UMKM yang tergolong tidak terlalu terdampak akibat Covid-19 dan yang terdampak. Sehingga Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang bisa secara langsung melakukan penindakan awal dengan memberi insentif bantuan berupa alat-alat kelengkapan usaha, ataupun pinjaman nantinya.

## **2. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang dalam Melakukan Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dalam penerapannya, strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Padang tidak selalu berlangsung muluseperti sebagaimana mestinya di postur kebijakan atau diformulasikan sebelumnya, ada beberapa tantangan atau kendala maupun kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Kendala tersebut ditemui ketika pelaksanaan strategi pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Artinya, kendala-kendala ini membuat tugas Dinas Koperasi dan UMKM makin menjadi berat karena selain dari menghadapi beberapa tantangan, masa kritis Covid-19 juga menjadi kendala tersendiri bagi pengembangan sektor UMKM.

Pengembangan dari UMKM di Indonesiadapat kita lihat secara Bersama tidak akan bisa lepas dari beragamnya persoalan yang seringkali muncul dalam prosesnya. Berbagai-macam persoalan dari sifat dan tingkat masalah tersebut tidak berkuat pada apa yang menjadi produk sesuai jenisnya ataupun bentuk pasar pelayanan semata, tetapi termasuk juga perbedaan di berbagai segmentary daerah atau lokasi, antara berbagai kelompok ekolomi atau subsector lainnya serta antara unit-unit usaha yang berkegiatan di sektor tersebut (Tambunan, 2002).

Agar lebih mudah untuk kemudian dipahami, peneliti akan membagi secara spesifik apa-apa saja berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam melakukan pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Peneliti akan menggunakan pendekatan teoritis dari Tambunan (2002) yang membagi kendala yang seringkali dihadapi oleh UMKM meliputi; kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, keterbatasan bahan baku, serta keterbatasan teknologi pada sektor produksi.

Indikator tersebut akan dibahas sesuai dengan temuan penelitian berikut:

### 2.1. Kesulitan Pemasaran

Tambunan (2007) menjelaskan bahwa pemasaran seringkali dipandang sebagai bagian dari kendala kritis bagi proses perkembangan di sektor UMKM dari semua tingkatan. Beberapa faktor yang berkaitan dengan persoalan dari pemasaran ialah terkendala dalam hal tekanan yang cukup kuat dari segi kompetisi, tekanan ini dapat berasal dari pasar domestic ataupun dari sektor usaha yang membidangi segmentasi pasar yang sama.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa para pelaku UMKM kesulitan untuk memasarkan produk atau jasa mereka akibat adanya pembatasan social distancing secara fisik sehingga ini mempengaruhi minat beli konsumen terhadap UMKM. Selain pembatasan jarak fisik, pemerintah juga mengatur aturan mengenai jam tutup dan kapasitas maksimal dari pembeli, ini juga menjadi faktor yang menyebabkan sulitnya pemasaran untuk dilakukan.

### 2.2. Keterbatasan Finansial

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Indonesia seringkalidihadapkan padabanyak permasalahan, dua diantaranya ialah masalah dalam hal finansial yakni hubungan relasi modal awal dan akses kepada modal kerja, serta pelaksanaan finansial berkelanjutan dalam masa jangka berkelanjutan yang dirasa sangat penting demi tumbuh kembangnya UMKM kedepan (Tambunan, 2002).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam permasalahan finansial, pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan insentif modal 2,4 juta per tahun bagi UMKM, namun yang menjadi masalah ialah seleksi penerimaan modal yang cukup ketat dan tiap-tiap UMKM yang hanya bisa mendapatkan 1 kali. Tentu ini sangat tidak cukup bagi pelaku UMKM yang

jumlahnya sangat banyak dengan mekanisme seleksi penerimaan modal yang cukup sulit seperti itu.

Modal atau finansial diakui memang menjadi kebutuhan primer bagi para pelaku UMKM, sedangkan Pemerintah Daerah dalam hal ini tingkat provinsi maupun kota tidak menyediakan secara terukur bantuan berupa modal, namun Pemerintah Daerah lebih kepada menyediakan sarana dan prasarana kelengkapan produksi dari UMKM yang dirasa memang memerlukannya.

### 2.3. Keterbatasan SDM

Dalam pengertian Tambunan (2002) keterbatasan dari adanya SDM adalah termasuk suatu kendala yang dirasa cukup mengganggu sektor UMKM di tingkatan nasional ialah berkuat pada skala entrepreneurship, manajemen usaha, memproduksi usaha dengan teknik yang memadai, mengembangkan jenis produk, desain teknis, kualitas control, mengorganisir usaha, proses rekap akuntan, memproses data usaha, strategi marketing, serta riset market. Adanya batasan SDM tersebut kemudian secara langsung dapat membatasi gerak dari usaha mikro dan kecil Indonesia agar dapat berkompetisi secara sectoral pada pasar domestik ataupun di pasar global.

Dari hasil penelitian di atas ditemukan bahwa pandemi Covid-19 telah membuat multiplier efek di hampir seluruh sektor, terkhusus sektor UMKM. Kondisi Covid-19 yang berimbas kepada lemahnya jual-beli menjadikan banyak SDM dari UMKM yang di-PHK. Sehingga ini menciptakan kondisi keterbatasan SDM di tengah-tengah kebutuhan akan SDM sedang tinggi-tingginya namun tidak didukung oleh modal yang cukup.

Sedangkan di sisi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, menurut hasil observasi langsung peneliti terlihat bahwa SDM yang paham betul mengenai persoalan di sektor UMKM sangat sedikit, maka dari itu perlu kiranya ditambah dengan personil atau SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di sektor UMKM sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang akan menyentuh UMKM bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

### 2.4. Keterbatasan Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku serta berbagai faktor-faktor produksi seringkali menjadi suatu kendala yang cukup serius bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM atau bagi kelangsungan produksi UMKM di Indonesia. Keterbatasan dapat terjadi diakibatkan oleh harga produk bahan baku yang dirasa terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pelaku ekonomi atau jumlahnya bisa jatuh merosot sehingga menjadi terbatas (Tambunan, 2002).

Menurut hasil penelitian di atas ditemukan bahwa keterbatasan bahan baku memang menjadi kendala yang cukup vital bagi pengembangan UMKM. Akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang berefek bagi semua sektor, hingga menyebabkan bahan baku cukup sukar untuk ditemukan. Namun adanya kemerosotan jumlah bahan baku ini tidak menjadi kendala yang serius bagi UMKM di Kota Padang karena sejauh ini bahan baku tergolong masih cukup mudah untuk ditemukan di pasaran.

### 2.5. Keterbatasan Teknologi

Tambunan (2002) menjelaskan bahwa UMKM yang tersebar di Indonesia secara umum memiliki kecenderungan masih menggunakan teknologi yang cenderung konservatif atau



masih tradisional yang mana kebanyakan masih menggunakan mesin yang sudah tidak kompeten di zaman ini atau alat-alat produksi yang sifatnya masih dilakukan secara praktik dengan manusia yang turun langsung. Teknologi yang masih tergolong ketinggalan ini tidak hanya mempengaruhi turunnya total angka produktifitas dan tingkat efisiensi pada jalannya proses-proses produksi, akan tetapi juga sangat mempengaruhi kualitas dari produk.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jarak antara pelaku UMKM dengan teknologi menjadi salah satu kendala dalam pengembangan UMKM. Apalagi di zaman era teknologi saat ini, hampir semua orang dari bermacam umur terintegrasi dengan teknologi, sehingga secara logika, hanya UMKM yang mengafiliasikan diri dengan teknologi-lah yang semestinya dapat terus berkembang kedepan.

Pada kenyataannya di lapangan sendiri, UMKM di Kota Padang rata-rata telah terintegrasi dengan teknologi seperti aplikasi jual-beli di handphone. Namun sayangnya, belum terlalu ada inovasi atau pembaharuan dari UMKM tersebut untuk kemudian dipertontonkan di sosial media dalam rangka menarik minat konsumen untuk membeli atau memakai jasa UMKM tersebut.

Selain inovasi dan kreatifitas yang belum terbangun secara maksimal, pengetahuan akan akses terhadap sumber informasi di bidang IT juga menjadi persoalan yang diakui oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Edukasi atas keterbatasan akses informasi ini juga menjadi kendala yang menghambat pengembangan sektor UMKM di Kota Padang.

### **3. Upaya dan Langkah yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang dalam Meningkatkan Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pada pelaksanaan strategi pengembangan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tidak akan selalu mulus, akan ada kendala dan tantangan yang dihadapi saat penerapannya. Maka dari itu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mengupayakan upaya serta langkah-langkah dalam mengembangkan UMKM pada masa pandemi Covid-19, selain sebagai bentuk upaya pengembangan, langkah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang juga sebagai bentuk meminimalisir kendala dan resiko kendala yang mungkin terjadi saat melakukan strategi pengembangan UMKM di wilayah Kota Padang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 sendiri secara gamblang mendeskripsikan bahwa pengembangan merupakan bentuk aktivitas dalam kerangka pengetahuan yang kompleks dalam hal digitalisasi yang memiliki visi dalam memberdayakan keberanian pada keilmuan usaha dan bisnis dari segi kebermanfaatan dan pengaplikasiannya secara mutakhir sesuai dengan perkembangan zaman (mutakhir).

Seels dan Richey dalam Alim Sumarno (2012) juga menyebutkan lebih jauh dalam deskripsinya mengenai tumbuhkembangnya UMKM lebih diibaratkan sebuah proses dalam mendeskripsikan rancangan spesifikasi kepada hal-hal berbentuk fisik, dan diterjemahkan sehingga dapat memproduksi produk-produk edukatif. Iskandar Wiryokusumo (2011) mendefinisikan lebih jauh bahwa pengembangan ialah bentuk usaha dari Pendidikan secara formal ataupun non formal yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkembangkan suatu dasar secara seimbang serta lebih optimal.

Upaya dan langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) Kota Padang dalam meningkatkan pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19 akan dikaji menggunakan pendekatan teoritis dari (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2016) dimana terdapat 2 upaya dan langkah dalam meningkatkan pengembangan UMKM; dari internal dan eksternal.

Indikator tersebut akan dibahas sesuai dengan temuan penelitian sebagai berikut:

### 3.1. Secara Internal

Dalam pengertian Anggraeni, Hardjanto, & Hayat (2016) disebutkan bahwa sektor internal berperan penting sebagai pengelola langsung dari UMKM itu sendiri, sektor internal dapat terdiri dari beberapa hal seperti sumber modal, produk inovatif, relasi marketing, hingga pengadaan berbagai macam infrastruktur produksi dari UMKM.

Dari hasil penelitian diatas ditemukan bahwa secara internal, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mengupayakan langkah tersistematis terlebih dahulu dengan cara mendata berbagai UMKM Kota Padang secara manual dan mengevaluasi keadaan UMKM di masa pandemic Covid-19 melalui tenaga pendamping UMKM sehingga selanjutnya dapat diupayakan intervensi berupa pelatihan atau pembinaan untuk membekali UMKM secara sadar mengembangkan usahanya.

Setelah mendata dan membekali UMKM terdampak Covid-19, pihak Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM juga memberikan pendekatan sosialisasi edukatif terhadap para pelaku UMKM. Sosialisasi ini selain berguna untuk data pengembangan kedepan, juga memberikan peluang agar UMKM dapat bersinergi dengan Pemerintah dalam mengusahakan inovasi serta insentif bantuan nantinya.

### 3.2. Secara eksternal

Eksternal diartikan sebagai bentuk upaya dan langkah peningkatan pengembangan UMKM dari sisi luar UMKM. Sektor eksternal dapat mempengaruhi jalannya ekosistem usaha dari UMKM, biasanya dapat terdiri dari kemudahan aksesibilitas pada UMKM terhadap berbagai sumber-sumber permodalan, pengadaan pembinaan serta bentuk-bentuk pelatihan, peningkatan promosi produk, hingga pada perluasan pemasaran dari produk.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara eksternal, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang membangun koordinasi integral dengan organisasi perangkat daerah lain, seperti contoh dengan DPRD Kota Padang, dimana Dinas Koperasi dan UMKM mengupayakan persoalan yang sedang dihadapi oleh pelaku UMKM untuk kemudian dicarikan solusi; dapat berupa bantuan modal kepada UMKM yang terdampak, ataupun bantuan sarana dan prasarana alat-alat kelengkapan produksi bagi UMKM.

Diluar koordinasi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang juga berupaya agar selalu secara berjangka melakukan evaluasi dan monitoring nantinya kepada tenaga pendamping UMKM agar dapat diketahui perkembangan terkini dari UMKM yang tersebar di wilayah Kota Padang.

## **Kesimpulan**

Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang dalam melaksanakan pengembangan UMKM sebagai bentuk tugas dan tanggungjawabnya pada masa pandemi Covid-19 sejauh ini berjalan cukup lancar dan tersistematis sesuai

dengan tujuan dalam mewujudkan UMKM yang mandiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1998 melalui pembekalan data mengenai kondisi dan jumlah UMKM yang tersebar di Kota Padang serta penekanan pada metode pelatihan dan pembinaan UMKM demi mengupayakan pengembangan yang inovatif bagi UMKM di masa pandemi Covid-19. Namun dengan catatan masih dibutuhkan beberapa intervensi sektoral yang lebih terukur dan tepat sasaran pada pelaksanaan kebijakannya.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang menghadapi beberapa persoalan atau kendala di lapangan dalam melaksanakan pengembangan UMKM, diantaranya ialah; kesulitan pemasaran produk atau jasa akibat keterbatasan-keterbatasan di masa pandemic Covid-19, keterbatasan finansial dari para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya yang sekaligus berdampak pada keterbatasan sumber daya manusia, disamping itu keterbatasan finansial dari Pemerintah juga menjadi persoalan yang berakibat pada UMKM yang belum terakomodir secara merata oleh insentif dari Pemerintah, serta dalam beberapa kesempatan ditemukan kelangkaan bahan baku di pasar yang menjadi penghambat berkembangnya UMKM di Kota Padang.

Upaya dan langkah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang dalam meningkatkan pengembangan UMKM pada masa pandemic Covid-19 diupayakan secara internal melalui langkah sistematis dengan mendata jumlah dan keluhan UMKM serta membekali UMKM dengan pembinaan untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas di masa pandemic Covid-19. Secara eksternal juga diupayakan koordinasi integral dengan organisasi perangkat daerah lain untuk memprovokasi langkah pengembangan yang lebih terkoordinasi di lingkup Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

### Daftar Rujukan

- Alim Sumarno. 2012. *Perbedaan Penelitian dan Pengembangan*. [Http://blog.elearning.unesa.ac.id/alim-sumarno/perbedaan-penelitian-dan-pengembangan](http://blog.elearning.unesa.ac.id/alim-sumarno/perbedaan-penelitian-dan-pengembangan)
- Agus Suryono. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management*. Jakarta: Buku 1 Edisi 12
- Dyah Ratih Sulistyastuti. 2004. *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 2, Desember 2004 Hal: 143 – 164
- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. 2013. *Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (studi kasus pada kelompok usaha “emping jagung” di kelurahan pandanwangi kecamatan blimbing, kota malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295
- Freddy Rangkuti. 2013. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Harjanto, Atta Putra. 2014. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Akuntabilitas, dan Integrasi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi*. Semarang. Skripsi S1. Universitas Diponegoro
- Hejazziey, Djawahir. 2009. *Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan*

- Pengurangan Pengangguran*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1
- Intan Andirani dan Nina Widowati. 2017. *Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang di Bidang Perindustrian)*. Journal of Policy and Management Review 6, No. 2: 782-797
- Iskandar Wiryokusumo. (2011). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marpaung, Happy. (2002). *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, & Lexy, J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Neuman, & W. Lawrence. (2013). *metode penelitian sosial pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif*. Jakarta Barat: PT indeks permata puri media
- Pearce II, John A, dan Robinson Richard B.Jr. (2008) *Manajemen Strategis 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Salusu, J. 1998. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*. Jakarta : PT Grasindo
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali. Pers, Jakarta
- Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada
- Perda Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- Peraturan Walikota Padang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang
- Peaturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Padang 2019-2024